



**JURNAL
AKUNTANSI DAN GOVERNANCE ANDALAS**

Laman Jurnal : www.jaga.unand.ac.id
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas
ISSN (Print) 2442-2363 | ISSN (Online)

JAGA
Jurnal Akuntansi & Governance Andalas

Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Khomsin Fajar Kurniawan^a, Siti Mutmainah^b

^aDepartemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro,
khomsin.fajar@gmail.com

^bDepartemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRACT
Sejarah artikel: Diterima: 19 Mei 2020 Diterima revisian: 19 Juli 2020 Diterima publikasi: 2 Agustus 2020	<i>This study aims to examine the effect of audit committee's characteristics consist of independency, expertise, size, meeting frequencies, authority, and gender audit committee on the timeliness of corporate financial reporting. Audit report lag is a proxy of the timeliness of corporate financial reporting. The samples in this study are manufacturing companies that listed on Indonesian Stock Exchange (IDX) on 2016-2018 consist of 252 observations.</i>
Kata Kunci: <i>Financial Reporting Timeliness, Audit Report Lag, Audit Committee's Characteristics</i>	<i>The result shows that audit committee's independency and size have positive significant and audit committee meeting frequencies has negative significant on audit report lag. Meanwhile, audit committee's expertise, authority, and gender have no significant influence on audit report lag. The results of this study indicate the need to improve the performance of the audit committee in order to improve the timeliness of financial reporting. In accordance with the mechanisms of good corporate governance, policymakers can regulate the attributes needed to improve the effectiveness of the audit committee, for example the expertise provisions, the proportion of women, or statements of the authority.</i>

1. PENDAHULUAN

Laporan keuangan adalah bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari perusahaan, karena sumber utama informasi untuk para pemangku kepentingan adalah bersumber dari laporan keuangan, seperti investor dan kreditor dalam pasar modal, sehingga diperlukan perhatian khusus oleh perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan, salah satunya adalah

jangka waktu perusahaan untuk dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu (Al-Ajmi, 2008). Hal ini menjadi penting karena keputusan yang diambil oleh para pemangku kepentingan sangat berdasar pada laporan dan informasi yang dimuat di dalamnya. Informasi tersebut akan sangat berguna apabila perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu (Agyei-Mensah, 2018). Laporan keuangan yang disajikan dalam jangka waktu yang wajar dan cenderung tepat juga akan mengurangi keasimetrisan informasi (Owusu-Ansah dan Leventis, 2006).

Ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan salah satu masalah yang sering terjadi di Indonesia. Beberapa tahun ini, yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 masih terdapat perusahaan-perusahaan yang dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan ke Bursa Efek Indonesia (BEI) melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, bahkan terdapat perusahaan yang tidak menyampaikan laporan keuangan tahunannya ke BEI. Berdasarkan Pengumuman BEI tentang Penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang Berakhir per 31 Desember 2018, terdapat 10 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan tahun 2018. 10 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2018 tersebut, 4 di antaranya diberhentikan sementara perdagangan efeknya di pasar reguler dan pasar tunai, sedangkan 6 perusahaan lainnya diperpanjang masa suspensinya. Selain itu, perusahaan yang terlambat atau bahkan tidak menyampaikan laporan keuangan akan mendapat sanksi administratif berupa denda. Menurut Ibadin *et al.* (2012) perusahaan yang menunda menyajikan laporan keuangan akan memberikan sinyal buruk kepada para pemangku kepentingan, karena perusahaan yang menunda menyajikan laporan keuangan cenderung mengalami kerugian.

Sudah terdapat peraturan yang mengatur tentang waktu penyampaian laporan keuangan. Peraturan tersebut dimaksudkan agar perusahaan dapat menyampaikan laporan keuangan dengan tepat waktu dan menjaga kemampuan informasi untuk mengambil keputusan bagi para pemangku kepentingan, terutama di pasar modal. Waktu penyampaian laporan keuangan di Indonesia sendiri diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan ini menggantikan peraturan Surat Keputusan Bapepam dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-431/BL/2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik. Berdasarkan peraturan OJK (2016) disebutkan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan revisi tahun 2015 dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang efektif per 1 Januari 2019, laporan keuangan perusahaan

harus dibuat dan tersedia untuk masyarakat dalam jangka waktu yang wajar dari penutupan akhir tahun keuangan perusahaan agar fungsi dan manfaatnya tidak terganggu. Hal tersebut sejalan dengan laporan keuangan sebagai sumber utama informasi. Ketika informasi dari laporan keuangan tidak tersedia ketika dibutuhkan, atau tersedia dengan jangka waktu yang lama setelah akhir tahun keuangan, maka tidak ada nilai untuk tindakan yang akan datang, tidak relevan, dan sedikit bahkan tidak dapat digunakan (Agyei-Mensah, 2018).

Jangka waktu penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satu faktor internal adalah manajemen perusahaan itu sendiri dalam mempersiapkan laporan keuangan, dan faktor eksternal perusahaan antara lain adalah auditor eksternal (Leventis *et al.*, 2005). Oleh karena itu, perusahaan harus menciptakan tata kelola perusahaan yang baik untuk menciptakan praktik usaha yang baik, efektif, dan efisien. Salah satunya adalah penyajian laporan keuangan yang tepat waktu. Dalam perusahaan tugas pembuatan laporan keuangan perusahaan dipegang oleh pihak manajemen atau direksi yang dalam pelaksanaannya diawasi dewan komisaris sebagai bentuk penciptaan tata kelola perusahaan yang baik (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).

Dewan komisaris memiliki kewenangan membentuk komite dalam rangka membantu pelaksanaan tanggung jawabnya. Komite yang dimaksud adalah komite audit. Salah satu tanggung jawab dari komite audit adalah untuk menelaah informasi keuangan perusahaan dan memberikan saran kepada direksi apabila ditemukan hal yang tidak sesuai dengan kerangka dasar pelaporan keuangan dan peraturan yang berlaku. Hal tersebut juga terkait dengan jangka waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar dan tepat waktu.

Kinerja komite audit yang dipengaruhi oleh karakteristik komite audit itu sendiri berpengaruh terhadap efektivitas komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (Ika dan Ghazali, 2012). Dalam hal ini mencakup jangka waktu untuk perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan yang merupakan salah satu lingkup tugas dan tanggung jawab komite audit. Peraturan yang berlaku yang mengatur komite audit tidak mengatur secara eksplisit karakteristik komite audit sehingga dalam praktiknya masih banyak perbedaan dalam karakteristik komite audit yang mengakibatkan kinerja dan efektivitas komite audit antara satu perusahaan dan perusahaan lain berbeda juga. Penelitian yang dilakukan oleh Oussii dan Taktak (2018) menggunakan beberapa karakteristik, yaitu independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, otoritas komite audit. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Sultana *et al.* (2015) memasukkan karakteristik lain, yaitu pengalaman komite audit dan gender komite audit. Semua karakteristik tersebut memiliki

pengaruh yang berbeda terhadap kinerja komite audit, baik berpengaruh positif maupun berpengaruh negatif. Penelitian ini menggunakan beberapa karakteristik, yaitu independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, otoritas komite audit, dan gender komite audit.

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di Indonesia pada tahun 2019 dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari BEI berupa laporan tahunan perusahaan manufaktur mencakup periode tahun 2016-2018. Alasan memilih sektor manufaktur sebagai sampel penelitian karena peraturan yang mengatur tata kelola perusahaan manufaktur tidak seketat peraturan terhadap perusahaan keuangan yang lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku sehingga dapat memengaruhi perilaku dalam pelaporan keuangannya (Ika dan Ghazali, 2012).

2. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan kontraktual antara dua belah pihak di mana salah satu menjadi agen dan pihak yang lain menjadi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, prinsipal mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab kepada agen untuk mengelola dan mengambil keputusan-keputusan yang diharapkan dapat membantu mencapai tujuan tersebut.

Dalam praktiknya agen cenderung memiliki informasi yang lebih banyak daripada informasi yang dimiliki oleh prinsipal, maka terjadilah yang dinamakan ketimpangan informasi (*asymmetric information*) (Ika dan Ghazali, 2012). Hal inilah yang menyebabkan timbulnya *agency problems*. Menurut Jensen dan Meckling (1976) terdapat dua bentuk dari *agency problems* yang dialami oleh perusahaan, yaitu: 1) *Moral hazard*, yakni permasalahan yang muncul ketika agen tidak melaksanakan hal-hal yang telah disepakati dalam kontrak; 2) *Adverse selection*, merupakan permasalahan yang muncul ketika prinsipal tidak dapat mengetahui secara pasti apakah keputusan yang diambil oleh agen berdasarkan informasi yang diperoleh atau merupakan akibat kelalaian kerja.

Untuk meminimalkan masalah keagenan yang terjadi, prinsipal kemudian membentuk dewan komisaris yang bertugas untuk mengawasi dan memberi nasihat kepada direksi (KNKG, 2006). Dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk komite-komite, salah satunya komite audit (KNKG, 2006). Pembentukan komite audit jika dilihat dari perspektif prinsipal adalah sebagai bentuk mekanisme pemantauan di bidang pelaporan keuangan yang berupaya untuk mengurangi masalah-masalah prinsipal dengan agen (Oussii dan Taktak, 2018).

Keberadaan komite audit adalah untuk melindungi kepentingan *shareholders* melalui tanggung jawab pengawasan dengan lingkup pelaporan keuangan, kontrol internal, dan aktivitas eksternal audit (Turley dan Zaman, 2004). Oleh karena itu, ketepatan waktu pelaporan keuangan juga merupakan salah satu hal yang juga harus diawasi oleh komite audit agar manajemen dapat membuat dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan sesuai dengan kaidah yang berlaku serta tepat waktu.

2.2 Teori Peran Gender

Gender adalah bagian dari karakteristik biografis individu yang merupakan karakteristik pribadi yang objektif (Robbins, 2001). Istilah teori peran gender pertama kali dicetuskan oleh John Money pada tahun 1955 yang menyatakan bahwa perilaku dan sikap yang tumbuh pada pria dan wanita berasal dari budaya keluarga, sedangkan proses sosialisasi akan berpengaruh pada perbedaan gender nonfisik.

Perbedaan gender juga berpengaruh terhadap proses pengolahan informasi yang diterima oleh pria dan wanita. Menurut Meyers-Levy (dalam Sari dan Supadmi, 2014) pria cenderung akan memproses informasi secara terbatas dalam menyelesaikan masalah, sedangkan wanita cenderung lebih rinci dalam memproses informasi terutama dalam pengambilan keputusan. Selain itu, wanita cenderung bekerja lebih rapi dan berhati-hati dibandingkan dengan pria. Wanita juga akan memilih cara yang aman dalam pengambilan keputusan dibandingkan pria yang lebih berani mengambil risiko (Amanatullah dan Morris, 2010). Perbedaan gender dalam anggota komite audit juga diharapkan akan mampu meningkatkan proses pengawasan proses pelaporan keuangan, sehingga dapat meningkatkan kinerja manajemen agar laporan dapat disajikan secara tepat waktu (Anugrah dan Laksito, 2017).

2.3 Pengaruh Independensi Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan komite audit paling sedikit memiliki 3 anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak luar perusahaan. Independensi juga menjadi syarat untuk dapat menjadi anggota komite audit dengan artian bahwa pihak luar tersebut tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan tersebut. Menurut Goodwin-Stewart dan Kent (2006), semakin banyak komite audit yang independen akan cenderung lebih mampu untuk meningkatkan proses pelaporan keuangan,

karena jumlah anggota komite audit independen yang tinggi mampu mengurangi kecurangan dan bias dalam pelaporan keuangan (Abbott *et al.*, 2004).

Hasil Oussii dan Taktak (2018) menunjukkan bahwa independensi komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Ika dan Ghazali (2012) menemukan bahwa efektivitas komite audit yang di dalamnya terdapat karakteristik independensi komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hal tersebut juga ditemukan oleh Sultana *et al.* (2015) yang menunjukkan independensi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*. Hasil serupa juga ditemukan oleh Rawikarani (2019) yang menunjukkan bahwa independensi komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *audit delay*. Hasil lain ditemukan dalam penelitian Anugrah dan Laksito (2017) dan Tinambunan *et al.* (2013) bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Aktivitas dan peran dari komite audit yang independen adalah untuk mengurangi waktu yang dibutuhkan terkait masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H1: Independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.4 Pengaruh Keahlian Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Komite audit memiliki lingkup tugas dan tanggung jawab yang salah satunya berhubungan dengan pelaporan keuangan. Hal tersebut membuat komite audit membutuhkan anggota yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan (Dezoort, 1998). Keberadaan anggota komite audit dengan keahlian dalam bidang keuangan akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam melakukan tugas pengawasan (Oussii dan Taktak, 2018). Hal tersebut karena komite audit bekerja seperti auditor eksternal dengan bertanya dengan semua pihak dalam perusahaan untuk memastikan integritas laporan keuangan (Ika dan Ghazali, 2012). Saran atau rekomendasi yang diberikan oleh komite audit berdasar pada dengan standar yang berlaku, laporan keuangan perusahaan yang dibuat akan lebih baik dan mempercepat proses audit, sehingga laporan keuangan perusahaan dapat disajikan secara tepat waktu.

Oussii dan Taktak (2018) dan Anugrah dan Laksito (2017) menemukan bahwa keahlian anggota komite audit berpengaruh secara negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sultana *et al.* (2015) keahlian komite audit memiliki pengaruh terhadap *audit report lag* dan juga efektif untuk meningkatkan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Hasil berbeda didapatkan oleh Tinambunan *et al.* (2013), dalam penelitiannya keahlian komite audit tidak memiliki hubungan dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H2: Keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.5 Pengaruh Ukuran Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Komite audit terdiri dari 3 orang anggota paling sedikit. Untuk dapat melakukan tugas secara efektif, audit komite harus memiliki jumlah anggota yang memadai untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya (Dezoort *et al.*, 2002). Jumlah anggota komite audit yang semakin banyak yang dimiliki perusahaan, maka semakin banyak sumber daya yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah keagenan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit, semakin sulit bagi manajer atau direksi untuk tidak melakukan penyesuaian atas saran yang diberikan oleh komite audit maupun auditor eksternal (Oussii dan Taktak, 2018).

Oussii dan Taktak (2018) dalam penelitiannya menemukan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, sementara Anugrah dan Laksito (2017) dan Tinambunan *et al.* (2013) menemukan hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh secara negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Akinleye dan Aduwo (2019) juga menemukan bahwa ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, tetapi tidak signifikan. Penelitian yang dilakukan oleh Sultana *et al.* (2015) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H3: Ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.6 Pengaruh Frekuensi Rapat Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Komite audit hanya dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya melalui seringnya melakukan pertemuan atau rapat (Abbott *et al.*, 2004). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengatur jumlah rapat yang harus diselenggarakan secara berkala oleh komite audit adalah paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan atau 4 kali dalam setahun.

Komite audit yang sering menyelenggarakan rapat akan melakukan tugas pengawasan dan pemantauan keuangan yang lebih sering juga, sehingga hal tersebut cenderung dapat mendorong pihak manajemen untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu (Anugrah dan Laksito, 2017).

Oussii dan Taktak (2018) menemukan hasil bahwa frekuensi rapat tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Hasil lain ditemukan oleh Rawikarani (2019) yang menunjukkan frekuensi rapat komite audit berpengaruh signifikan terhadap *audit delay*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Anugrah dan Laksito (2017) dan Tinambunan *et al.* (2013) mendapatkan hasil bahwa frekuensi rapat komite audit berpengaruh secara negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H4: Frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.7 Pengaruh Otoritas Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Otoritas komite audit merujuk pada tanggung jawab komite audit untuk meninjau efektivitas pengendalian internal yang dimiliki perusahaan, memilih dan merekomendasikan perusahaan audit, memberi pertanyaan kepada auditor dan memiliki akses terhadap informasi dan dokumen yang relevan (Dezoort *et al.*, 2002). Secara garis besar berdasarkan peraturan OJK tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit adalah melakukan penelaahan dan memberikan rekomendasi, serta melakukan pemantauan.

Ketika komite audit patuh dengan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sesuai dengan peraturan, maka diharapkan kinerja komite audit dan pelaksanaan tugas-tugas akan menjadi semakin baik dan efektif khususnya tugas yang berkaitan dengan pelaporan keuangan. Hal tersebut akan membantu perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu.

Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Oussii dan Taktak (2018) menemukan bahwa otoritas komite audit tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, tetapi dalam penelitian Ika dan Ghazali (2012) menunjukkan bahwa otoritas komite audit sebagai salah satu elemen dari efektivitas komite audit berpengaruh negatif signifikan.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H5: Otoritas komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

2.8 Pengaruh Gender Komite Audit Terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan

Gender merupakan karakteristik yang melekat pada individu yang dianggap dapat digunakan untuk membedakan pria dan wanita, serta mencerminkan jenis kelamin biologis maupun identitas gender (Sari dan Supadmi, 2014). Menurut Abbot *et al.* (2012) keberadaan anggota dewan dengan gender wanita akan mempengaruhi pengambilan keputusan dalam dewan tersebut. Hal tersebut karena pria lebih berani mengambil risiko dalam menentukan

keputusan, sedangkan wanita akan memilih hal yang aman dalam mengambil keputusan (Amanatullah dan Morris, 2010). Keberadaan anggota komite audit wanita dan semakin banyak komposisi anggota komite audit wanita yang lebih hati-hati diharapkan akan mempercepat proses audit dan mengurangi *audit delay* karena laporan yang disusun perusahaan sudah baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Supadmi (2014) menemukan hasil bahwa gender anggota komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Hasil serupa juga ditemukan oleh Anugrah dan Laksito (2017) yang dalam penelitiannya menemukan bahwa gender komite audit berpengaruh secara negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Sultana *et al.* (2015) menemukan bahwa gender komite tidak terlalu berpengaruh terhadap *audit report lag*.

Berdasarkan uraian di atas, hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H6: Gender komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Ketepatan waktu pelaporan keuangan dalam penelitian ini diukur menggunakan *audit report lag*. *Audit report lag* adalah jumlah hari dari tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan perusahaan sampai laporan keuangan tahunan auditan diterbitkan.

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi variabel dependen, baik secara positif atau negatif (Sekaran dan Bougie, 2016). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, frekuensi rapat komite audit, otoritas komite audit, dan gender komite audit.

Independensi komite audit dikaitkan dengan tingkat integritas anggota komite audit yang diperlukan untuk menjaga objektivitas komite audit dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (FCGI, 2002). Dalam penelitian ini diukur dengan cara menghitung persentase atau proporsi anggota komite audit yang independen dibanding dengan jumlah keseluruhan komite audit.

Keahlian komite audit adalah keahlian dalam bidang keuangan atau akuntansi yang sangat dibutuhkan dalam komite audit karena salah lingkup tugas dan tanggung jawab komite audit adalah pelaporan keuangan (Dezoort, 1998). Dalam penelitian ini, variabel keahlian komite audit diukur dengan cara menghitung persentase jumlah anggota komite audit yang

memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi dibanding dengan jumlah keseluruhan komite audit.

Jumlah komite audit harus cukup dalam sebuah perusahaan karena jumlah komite audit akan memengaruhi efektivitas komite audit dalam melaksanakan tugasnya (Dezoort *et al.*, 2002). Dalam penelitian ini, variabel ukuran komite audit akan diukur secara riil dengan menghitung jumlah komite audit secara keseluruhan dalam sebuah perusahaan.

Frekuensi rapat komite audit salah satu sarana bagi komite audit untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam penelitian ini, variabel frekuensi rapat komite audit diukur dengan cara menghitung jumlah total rapat yang telah diselenggarakan oleh komite audit dalam satu tahun.

Otoritas komite audit merujuk pada tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit dan pelaksanaan tugas komite audit (Dezoort *et al.*, 2002). Dalam penelitian ini, variabel otoritas komite audit diukur dengan variabel *dummy*. Perusahaan yang melaporkan hasil kegiatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab selama setahun dalam laporan tahunan diberi kode 1 dan perusahaan yang tidak menyajikan melaporkan hasil kegiatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab diberi kode 0.

gender komite audit wanita memengaruhi keputusan yang diambil oleh dewan (Abbot *et al.*, 2012), karena wanita akan memilih hal yang aman ketika mengambil keputusan. Dalam penelitian ini, variabel gender komite audit diukur dengan menghitung persentase atau proporsi anggota komite audit bergender wanita dibanding dengan jumlah keseluruhan komite audit.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016-2018. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode *purposive sampling* adalah metode untuk menentukan sampel dari populasi dengan menggunakan kriteria khusus. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.
2. Perusahaan manufaktur yang secara berturut-turut menyajikan laporan tahunan pada situs Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018.
3. Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebelum atau sejak tahun 2016, bukan tahun setelahnya.
4. Data-data yang dibutuhkan untuk menganalisis setiap variabel penelitian tersedia.

3.3 Metode Analisis

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan dalam penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$ARL = \alpha - \beta_1 ACINDEP - \beta_2 ACEXP - \beta_3 ACSIZE - \beta_4 ACMEET - \beta_5 ACAUTH - \beta_6 ACGEND - \varepsilon$$

Penjelasan model regresi:

ARL	=Jumlah hari dari tanggal laporan keuangan perusahaan tutup buku sampai dengan diterbitkannya laporan keuangan tahunan auditan.
α	=Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5, \beta_6$	=Koefisien
ACINDEP	=Proporsi komite audit yang independen terhadap jumlah keseluruhan komite audit dalam sebuah perusahaan.
ACEXP	= Proporsi jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi.
ACSIZE	=Jumlah komite audit secara keseluruhan dalam sebuah perusahaan.
ACMEET	=Jumlah total rapat yang telah diselenggarakan oleh komite audit dalam satu tahun
ACAUTH	=Perusahaan yang melaporkan hasil kegiatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab diberi kode 1 dan perusahaan yang tidak diberi kode 0.
ACGEND	=Proporsi komite audit bergender wanita dengan jumlah keseluruhan komite audit.
ε	=Error

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. Tabel 1 meringkas proses pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 1
Proses Pemilihan Sampel

Kriteria Pemilihan Sampel	Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018	166
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018 tetapi tidak menyampaikan laporan tahunan baik tahun 2016, 2017, 2018	(22)
Perusahaan yang terdaftar pertama kalinya di BEI setelah tahun 2016	(21)
Perusahaan yang datanya tidak lengkap untuk digunakan dalam penelitian	(19)
<i>Outlier</i>	(20)
Sampel Penelitian	84
Total Observasi (84 x 3)	252

Statistik deskriptif variabel penelitian ditampilkan pada tabel 2.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Nilai Minimum	Nilai Maksimum	Rata- rata	Deviasi Standar
<i>Audit Report Lag</i>	252	48	92	79,409	8,488
Independensi Komite Audit	252	0,75	1	0,996	0,031
Keahlian Komite Audit	252	0,25	1	0,813	0,222
Ukuran Komite Audit	252	2	6	3,036	0,258
Frekuensi Rapat Komite Audit	252	3	49	6,488	5,472
Gender Komite Audit	252	0	1	0,194	0,250

Tabel 2 memiliki makna bahwa waktu perusahaan manufaktur untuk menerbitkan laporan keuangan tahunan auditan paling cepat adalah 48 hari dan paling lama adalah 92 hari, dengan rata-rata 79 hari dari tanggal tutup buku laporan keuangan tahunan perusahaan. Persentase jumlah anggota komite audit yang independen dalam sebuah perusahaan yang paling sedikit adalah 75% dan paling banyak adalah 100% dari jumlah total anggota komite audit. Persentase jumlah anggota komite audit yang memiliki keahlian dalam bidang keuangan dan akuntansi dalam sebuah perusahaan yang paling sedikit adalah 25% dan paling banyak adalah 100% dari jumlah total anggota komite audit, dengan nilai rata-rata 81,3%. Jumlah komite audit pada perusahaan sampel paling sedikit adalah 2 orang dan paling banyak adalah 6 orang. Mayoritas perusahaan sampel (96,4%) memiliki 3 orang anggota Komite Audit, seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2
Frekuensi Ukuran Komite Audit

Ukuran Komite Audit	Frekuensi	Persentase
2 orang anggota	1	0,4%
3 orang anggota	243	96,4%
4 orang anggota	7	2,8%
6 orang anggota	1	0,4%
Total	252	100,0

Frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit yang paling sedikit adalah 2 kali dan paling banyak adalah 49 kali. Mayoritas perusahaan sampel (85,7%) melakukan rapat komite audit sebanyak 1-10 kali dalam setahun. Frekuensi rapat yang dilakukan perusahaan sampel ditampilkan berikut ini.

Tabel 3
Statistik Distribusi Frekuensi Rapat Komite Audit

Rapat Komite Audit	Frekuensi	Persentase
1-10 kali	216	85,7%
11-20 kali	30	11,9%
21-30 kali	3	1,2%
31-40 kali	0	0,0%
41-50 kali	3	1,2%

Variabel otoritas komite audit diukur dengan variabel *dummy* dengan melihat pelaksanaan tugas dan pelaporan kegiatan yang meliputi pelaporan keuangan, pengendalian internal, auditor eksternal, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Tabel 4
Frekuensi Otoritas Komite Audit

	Frekuensi	Persentase
Laporan komite audit tidak lengkap	105	41,7%
Laporan komite audit lengkap	147	58,3%
Total	252	100%

Perusahaan yang tidak melaksanakan dan melaporkan kegiatannya secara lengkap dan sesuai berjumlah 105 perusahaan (41,7%). Perusahaan yang melaksanakan dan melaporkan kegiatannya secara lengkap dan sesuai yang berjumlah 147 perusahaan (58,3%).

4.2 Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan pengujian hasil asumsi klasik, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini telah lolos uji asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov menunjukkan tingkat signifikansi $>0,05$ untuk residual model regresinya (tabel 6). Uji autokorelasi dengan uji *run test* menunjukkan nilai signifikansi $>0,05$ (tabel 7). Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser menunjukkan hasil signifikansi $>0,05$ untuk semua variabel bebas (tabel 8). Hasil uji multikolinieritas menunjukkan nilai *tolerance* $>0,1$ dan *VIF* < 10 untuk semua variabel bebas (tabel 9).

Hasil pengujian tersebut ditampilkan berikut ini.

Tabel 5
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

	<i>Unstandardized Residual</i>
N	252
Kolmogorov-Smirnov Z	1,206
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,109

Tabel 6
Hasil Uji Run Test

	<i>Unstandardized Residual</i>
<i>Test Value</i>	-0,12768
Z	0,126
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,900

Tabel 7
Hasil Uji Glejser

	Sig.
Independensi Komite Audit	0,984
Keahlian Komite Audit	0,652
Ukuran Komite Audit	0,550
Frekuensi Rapat Komite Audit	0,413
Otoritas Komite Audit	0,214
Gender Komite Audit	0,958

Tabel 8
Hasil Uji Multikolinearitas

	<i>Tolerance</i>	VIF
Independensi Komite Audit	0,822	1,217
Keahlian Komite Audit	0,976	1,025
Ukuran Komite Audit	0,578	1,730
Frekuensi Rapat Komite Audit	0,638	1,567
Otoritas Komite Audit	0,968	1,033
Gender Komite Audit	0,973	1,028

Hasil pengujian signifikansi simultan dan koefisien determinasi ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel 10
Hasil Uji Signifikansi Simultan

Model	F	Sig.
<i>Regression</i>	5,266	0,000 ^a

Tabel 11
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Standart Error of the Estimate
1	0,338 ^a	0,114	0,093	1,07705

Hasil uji signifikansi simultan (Uji F) pada tabel 10 menunjukkan nilai signifikansi 0,000 kurang dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dapat digunakan untuk menguji pengaruh karakteristik komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel 11 menunjukkan nilai *adjusted R²* dalam model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebesar 0,093. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen untuk menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 9,3%.

Hasil pengujian hipotesis ditunjukkan pada tabel 12. Hipotesis pertama dengan variabel independensi komite audit (ACINDEP) memiliki nilai koefisien sebesar 5,295 dengan nilai signifikansi 0,000. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan yang menyatakan independensi komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis pertama tidak didukung. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sultana *et al.* (2015) yang menunjukkan independensi memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *audit report lag*.

Semakin tinggi proporsi anggota komite audit yang independen maka akan memperlambat perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Terdapat kemungkinan timbulnya tumpang tindih antara pekerjaan satu dengan yang lain yang bersifat operasional yang dapat memicu kekacauan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite audit (Anugrah dan Laksito, 2017). Terlalu banyak anggota komite audit yang independen akan membuat komite audit lebih terperinci dalam melaksanakan tugas terkait pelaporan keuangan dan memberi tuntutan yang tinggi juga kepada pihak manajemen untuk menyusun laporan keuangan yang baik.

Tabel 12
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>	t	Sig.
(Constant)	3,270	2,971	0,003
Independensi Komite Audit	5,295	4,421	0,000
Keahlian Komite Audit	-0,006	-0,027	0,979
Ukuran Komite Audit	2,064	2,812	0,005
Frekuensi Rapat Komite Audit	-0,545	-3,947	0,000
Otoritas Komite Audit	-0,238	-1,704	0,090
Gender Komite Audit	0,214	0,538	0,591

Hipotesis kedua dengan variabel keahlian komite audit (ACEXP) memiliki nilai koefisien sebesar -0,006 dan nilai signifikansi sebesar 0,979. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif keahlian komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tetapi tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis kedua tidak didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Tinambunan *et al.*, 2013).

Keahlian di bidang keuangan atau akuntansi yang dimiliki oleh anggota komite audit tidak menjamin perusahaan mampu menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Keahlian komite audit yang diharapkan meningkatkan kinerja dan mempermudah tugas dan tanggung jawab dalam hal pelaporan keuangan, tetapi hal tersebut tidak menjadi dasar dari efektivitas komite audit dan jangka waktu penyajian laporan keuangan. Terdapat beberapa hal yang harus dilakukan yang mampu mendukung efektivitas kinerja komite audit, seperti kerja sama kelompok dan komunikasi yang baik.

Hipotesis ketiga dengan variabel ukuran komite audit (ACSIZE) memiliki nilai koefisien sebesar 2,064 dengan nilai signifikansi 0,005. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan yang menyatakan ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, hipotesis ketiga tidak didukung. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian Anugrah dan Laksito (2017) dan Tinambunan *et al.* (2013).

Semakin banyak jumlah anggota komite audit cenderung akan memperlambat perusahaan untuk menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Ukuran komite audit yang besar akan memperlemah tugas dan tanggung jawab karena akan menimbulkan masalah yang berkaitan dengan sulitnya komunikasi dan koordinasi antar anggota komite audit yang akan menyebabkan pelaksanaan tugas yang salah satunya berkaitan dengan pelaporan keuangan akan terhambat dan menjadi lebih lama, sehingga laporan keuangan tidak dapat disajikan secara tepat waktu.

Hipotesis keempat dengan variabel frekuensi rapat komite audit (ACMEET) memiliki nilai koefisien sebesar -0,545 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Frekuensi rapat komite audit menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif frekuensi rapat komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan dan terdapat pengaruh yang signifikan. Oleh karena itu, hipotesis keempat didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugrah dan Laksito (2017) dan Tinambunan *et al.* (2013).

Semakin tinggi frekuensi rapat yang dilakukan oleh komite audit maka semakin banyak tugas dan tanggung jawab yang dilaksanakan, salah satunya adalah pengawasan dan penelaahan pelaporan keuangan perusahaan. Frekuensi rapat yang tinggi juga meningkatkan komunikasi dan kerja sama antar anggota komite audit sehingga membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan masalah agen dan prinsipal (Anugrah dan Laksito, 2017).

Hipotesis kelima dengan variabel otoritas komite audit (ACAUTH) memiliki nilai koefisien sebesar -0,238 dan nilai signifikansi sebesar 0,090. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif otoritas komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tetapi tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis kelima tidak didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Oussii dan Taktak (2018).

Komite audit yang melaksanakan tugas yang sesuai dengan ketentuan dan peraturan berlaku tidak menjamin perusahaan untuk dapat menyajikan laporan keuangan secara tepat waktu. Sistem dan karakteristik tata kelola yang berbeda-beda di setiap perusahaan, serta ketentuan dan peraturan yang berlaku mengenai komite audit juga mampu memengaruhi segala kegiatan yang dilaksanakan komite audit (Oussii dan Taktak, 2018). Selain itu hal-hal lain juga harus diperhatikan, seperti komunikasi dan koordinasi melalui rapat.

Hipotesis keenam dengan variabel gender komite audit (ACGEND) memiliki nilai koefisien sebesar 0,214 dengan nilai signifikansi 0,591. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif gender komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan tetapi tidak signifikan. Oleh karena itu, hipotesis keenam tidak didukung. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sultana *et al.* (2015), tetapi bertentangan dengan hasil penelitian Sari dan Supadmi (2014) dan Anugrah dan Laksito (2017).

Sifat wanita yang lebih hati-hati dan menghindari risiko cenderung akan meningkatkan sifat konservatisme yang mampu mengakibatkan penyajian laporan keuangan perusahaan tidak tepat waktu, tetapi jumlah anggota bergender wanita dalam komite audit yang digunakan dalam sampel penelitian cenderung sedikit, yaitu berkisar antara 1 anggota atau 2 anggota yang bergender wanita dari jumlah keseluruhan anggota komite audit. Oleh karena itu, keberadaan

anggota komite audit bergender wanita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan.

5. KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan independensi dan ukuran komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan komite audit. Variabel frekuensi rapat komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap ketepatan waktu pelaporan komite audit. Penelitian ini tidak dapat menunjukkan dukungan pengaruh variabel keahlian, otoritas, dan gender komite audit terhadap ketepatan waktu pelaporan komite audit.

Keterbatasan penelitian ini ditunjukkan dengan nilai *adjusted R²* dalam model regresi yang digunakan pada penelitian ini adalah 0,093 atau 9,3%. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemampuan variabel independen yang diteliti untuk penelitian ini sangat kecil. Berdasarkan keterbatasan ini, maka saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, sebagai berikut: pertama, menambahkan variabel-variabel lain yang diindikasikan memiliki pengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Selain itu, dapat menggunakan metode pengukuran lain untuk mengukur variabel-variabel terkait, terutama variabel ketepatan waktu pelaporan keuangan. Kedua, menambahkan variabel kontrol dan variabel moderasi. Ketiga, memperluas sampel penelitian, dengan menggunakan sektor-sektor perusahaan lain, tidak hanya manufaktur. Keempat, melakukan penelitian lebih lanjut mengenai karakteristik komite audit dan asumsi-asumsi terkait yang sesuai dengan kondisi di Indonesia

REFERENSI

- Abbott, L. J., Parker, S., & Peters, G. F. (2004). Audit Committee Characteristics And Restatements. *Auditing*, 23(1), 69–87.
- Abbott, L. J., Parker, S., & Presley, T. J. (2012). Female Board Presence And The Likelihood Of Financial Restatement. *Accounting Horizons*, 26(4), 607–629.
- Agyei-Mensah, B. K. (2018). Impact Of Corporate Governance Attributes And Financial Reporting Lag On Corporate Financial Performance. *African Journal Of Economic And Management Studies*, 9(3), 349–366.
- Akinleye, G. T., & Aduwo, O. O. (2019). Effect Of Audit Committee Characteristics On The Timeliness Of Financial Reporting In Nigeria. *Journal Of Economics, Management And Trade*, 24(3), 1–10.
- Al-Ajmi, J. (2008). Audit And Reporting Delays: Evidence From An Emerging Market. *Advances In Accounting*, 24(2), 217–226.
- Amanatullah, E. T., & Morris, M. W. (2010). Negotiating Gender Roles: Gender Differences In Assertive Negotiating Are Mediated By Women's Fear Of Backlash And Attenuated When Negotiating On Behalf Of Others. *Journal Of Personality And Social Psychology*, 98(2), 256–267.
- Anugrah, E. Y., & Laksito, H. (2017). Pengaruh Efektivitas Komite Audit Terhadap Ketepatan

- Waktu Pelaporan (Studi Empiris Pada Perusahaan Non Keuangan Terdaftar Di Bei Tahun 2015). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(4), 1–13.
- Bursa Efek Indonesia. (2019). Pengumuman Penyampaian Laporan Keuangan Yang Berakhir Per 31 Desember 2018.
- Dezoort, F. T. (1998). An Analysis Of Experience Effects On Audit Committee Members' Oversight Judgments. *Accounting, Organizations And Society*, 23(1), 1–21.
- Dezoort, F Todd, Hermanson, D. R., Archambeault, D. S., & Reed, S. A. (2002). Audit Committee Effectiveness: A Synthesis Of The Empirical Audit Committee Literature. *Journal Of Accounting Literature*, 21, 38–75.
- Forum For Corporate Governance Indonesia. (2002). Peranan Dewan Komisaris Dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan) The Roles Of The Board Of Commissioners And The Audit Committee Peranan Dewan Komisaris Dan Komite Audit Dalam Pelaksanaan Corporate Governance.
- Goodwin-Stewart, J., & Kent, P. (2006). The Use Of Internal Audit By Australian Companies. *Managerial Auditing Journal*, 21(1), 81–101.
- Ibadin, I., Izedonmi, F., & Ibadin, P. (2012). The Association Between Selected Corporate Governance Attributes, Company Attributes And Timeliness Of Financial Reporting In Nigeria. *Research Journal Of Finance And Accounting ISSN*, 3(9), 137–144.
- Ika, S. R., & Mohd Ghazali, N. A. (2012). Audit Committee Effectiveness And Timeliness Of Reporting: Indonesian Evidence. *Managerial Auditing Journal*, 27(4), 403–424.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal Of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Komisi Nasional Kebijakan Governance. (2006). *Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia*.
- Leventis, S., Weetman, P., & Caramanis, C. (2005). Determinants Of Audit Report Lag: Some Evidence From The Athens Stock Exchange. *International Journal Of Auditing*, 9(1), 45–58.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /Pojk.04/2015 Tentang *Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 Tentang *Laporan Tahunan Emiten Atau Perusahaan Publik*.
- Oussii, A. A., & Boulila Taktak, N. (2018). Audit Committee Effectiveness And Financial Reporting Timeliness: The Case Of Tunisian Listed Companies. *African Journal Of Economic And Management Studies*, 9(1), 34–55.
- Owusu-Ansah, S., & Leventis, S. (2006). Timeliness Of Corporate Annual Financial Reporting In Greece. *European Accounting Review*, 15(2), 273–287.
- Rawikarani, D. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Komite Audit Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dan Jepang Tahun 2017). *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Robbins, S. P. (2001). *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi* (8th Ed.). Jakarta: PT Prenhallindo.
- Sari, M. M. R., & Supadmi, N. L. (2014). Gender Audit Committee And Audit Delay. *The Indonesian Accounting Review*, 4(01), 81.
- Sultana, N., Singh, H., & Van Der Zahn, J. L. W. M. (2015). Audit Committee Characteristics And Audit Report Lag. *International Journal Of Auditing*, 19(2), 72–87.
- Tinambunan, H., Zulfikar, R., & Ibrani, E. Y. (2013). Karakteristik Komite Audit Dan Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Dan Prosiding SNA - Simposium Nasional Akuntansi*, 16.

Turley, S., & Zaman, M. (2004). The Corporate Governance Effects Of Audit Committees.
Journal Of Management And Governance, 8(3), 305–332.